

DAFTAR SINGKATAN

TPPU	: Tindak Pidana Pencucian Uang
PPK	: Personil Pengendali Korporasi
BAPEPAM-LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
RUU KUHP	: Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
FATF	: Financial Action Task Force



DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kerangka Konseptual.....	14
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistem Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Kriminal.....	22
1. Pengertian Kebijakan.....	22
2. Pengertian Kebijakan/Politik Kriminal.....	22
3. Hubungan Politik Kriminal dan Politik Sosial.....	24
4. Kebijakan Penal.....	27

5. Kebijakan Non Penal.....	41
B. Kebijakan Hukum Pidana.....	45
1. Permasalahan Pokok Hukum Pidana.....	45
C. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	58
1. Pengertian Korporasi.....	58
2. Tahap-Tahap Pengakuan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana..	64
3. Model-Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	70
D. Ruang Lingkup Pencucian Uang.....	80
1. Pengertian Pencucian Uang.....	80
2. Tahapan Pencucian Uang	87
E. Tindak Pidana Pencucian Uang Di Bidang Pasar Modal.....	88
1. Proses <i>Placement</i> melalui Pasar Modal.....	88
2. <i>Layering</i> melalui Pasar Modal.....	90
3. Proses <i>Integration</i> melalui Pasar Modal.....	92
F. Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi Dalam Perspektif Islam.....	94

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Bidang Pasar Modal Menurut Hukum Positif.....	102
1. Pengertian Korporasi Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	105
2. Kapan Korporasi Melakukan Tindak Pidana.....	107
3. Siapa Yang Dapat Dipertanggungjawabkan.....	110
4. Tindak Pidana Yang Daat Dilakukan Oleh Korporasi Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	111
5. Sanksi yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Korporasi.....	143

6. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	145
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi.....	147
8. Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Pasar Modal oleh Korporasi.....	159
B. Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Masa Yang Akan Datang.....	170
1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP.....	170
2. Pertanggungjawaban Korporasi Di Beberapa Negara.....	182
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	200
B. SARAN.....	201
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

